

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 74 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
BIDANG SOSIAL BUDAYA
TAHUN 2023



RENCANA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2022

PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Tahun 2023 dapat diselesaikan. Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman kepada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 dan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang berisi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2023 dan akan menjadi pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar. Sebagai tindak lanjut dari implementasi Perubahan Renstra yang telah disusun untuk masa 5 (lima) tahun tersebut, renja ini dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan pengawasan internal sejak perencanaan sampai dengan pengawasan dan pelaporan yang nantinya berguna dalam proses responsibilitas dan akuntabilitas di Tahun 2023 sesuai dengan amanat Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kami berharap Renja ini dapat menjadi gambaran pelaksanaan tugas-tugas pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar. Kami juga menyadari bahwa Renja ini masih banyak yang perlu disempurnakan, sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dari semua pihak. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renja ini. Semoga Allah SWT selalu meridoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat dan negara.

Karanganyar, 29 Juli 2022
Inspektur Daerah
Kabupaten Karanganyar,



ZULFIKAR HADIDH, S.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19750311 199903 1 009

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul	
Salinan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2022.....	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022.....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	18
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	26
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	27
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	27
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah	32
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	37
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	45
BAB V PENUTUP	54

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2021..... 13

Tabel 2.2
Perkiraan Hasil Rencana Kerja Tahun 2022..... 18

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKP 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar 22

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Karanganyar 26

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kerja 2018-2023 Inspektorat Kabupaten Karanganyar 36

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 41

Tabel 4.1
Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan resmi daerah yang menjadi acuan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Renja merupakan bagian dari proses yang berkelanjutan dan sistematis dari Rencana Strategis (Renstra) untuk masa 5 (lima) tahun. Renja memuat tujuan, sasaran, kebijakan, uraian program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi suatu OPD dalam rangka mencapai visi misi Kepala Daerah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata Kelola Pemerintah daerah yang lebih baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar wajib menyusun Renja Perangkat Daerah (Renja PD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar adalah Lembaga pengawas internal yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Berkaitan dengan tugas dan fungsinya tersebut, dokumen Renja yang disusun juga berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa *output* dan *outcome* yang ingin diwujudkan pada satu tahun tertentu yang mengacu pada Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Inspektorat Daerah. Selain itu, penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dapat disesuaikan dengan evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun lalu, serta memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah.

Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 mengacu pada prinsip - prinsip perencanaan pembangunan daerah yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Perangkat Daerah Tahunan juga diperlukan untuk mengadopsi perubahan kondisi termasuk resiko - resiko yang mungkin menghalangi pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah karena perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahunan beresiko bias dan tidak relevan, sehingga tujuan dan sasaran tersebut tetap dapat tercapai secara ekonomis, efisien dan efektif. Tata cara penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah termaktub dalam Bagian Ketujuh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Renja Perangkat Daerah mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Dengan Renja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrument dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah yang meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Maka penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dilakukan dengan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renja;
2. Penyusunan rancangan awal Renja;
3. Penyusunan rancangan Renja;
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan Renja.

Renja Perangkat Daerah yang telah disusun mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Rancangan awal

RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Perangkat Daerah, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renja Perangkat Daerah juga disusun berdasarkan Perubahan Renstra Perangkat Daerah, dimana Perubahan Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja PD, selaras dengan Renstra Perangkat Daerah. Renja seluruh perangkat daerah se-Kabupaten Karanganyar akan menjadi bagian dari RKPD Kabupaten Karanganyar. RKPD menjadi acuan dalam pembuatan RAPBD, sehingga Renja Perangkat Daerah adalah komponen penting yang harus dibuat. Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/9/M.Pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 129);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
20. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 107 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
21. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
22. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 58 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Selain itu, Renja juga menggambarkan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, dan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Terakhir, Renja adalah sebagai wadah sinkronisasi untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah serta program-program dalam RKPD dengan mengutamakan isu-isu strategis tahun 2022.

Sedangkan tujuan penyusunan rencana kerja ini adalah :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar dalam menentukan prioritas program/kegiatan tahunan yang berdasarkan APBD;
2. Sebagai standar baku penjabaran tupoksi Inspektorat Daerah sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan;
3. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan organisasi;
4. Sebagai acuan pimpinan dan semua staf Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi-fungsi manajemen, demi terwujudnya optimalisasi tugas-tugas Inspektorat Daerah;
5. Agar Inspektorat Daerah mampu berperan sebagai fasilitator (mitra) bagi unit-unit kerja Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, menurut prinsip-prinsip *good governance* dan *clean government*.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 ini memuat program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar. Renja ini diuraikan secara singkat dalam masing-masing sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja agar substansi pada bab selanjutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian Renja, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah dalam penyusunan renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, serta tindak lanjutnya dalam proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan

ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK), kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan terkait maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Pada bagian ini akan dijabarkan realisasi, capaian serta analisis dari Renja tahun sebelumnya, faktor-faktor penghambat tercapainya target serta kebijakan-kebijakan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 dan perkiraan pencapaian Tahun 2022 yang mengacu pada APBD tahun berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditetapkan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berisikan uraian mengenai perkembangan tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk tahun rencana yang akan datang.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Berisikan uraian mengenai perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses perbandingan dilakukan, dan penjelasan temuan

2.5 dari hasil perbandingan.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Inspektorat Daerah tidak langsung berhubungan dengan usulan dan program kegiatan masyarakat.

BAB III Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar

Pada bagian ini menjabarkan tentang telaah terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah dan kebijakan dan program pembangunan nasional serta tujuan dan sasaran dengan jumlah program dan kegiatan.

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan data yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah

Memuat rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Perubahan Renstra Inspektorat Daerah 2018-2023.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Pada bagian ini menjabarkan tentang rencana kerja dan pendanaan dalam satu tahun anggaran.

BAB V Penutup

Pada bagian ini berisikan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 merupakan implementasi tahun keempat dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023. Perumusan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 didahului dengan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Renja Tahun 2021.

Evaluasi Renja Tahun Anggaran 2021 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan dokumen perencanaan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar, sehingga hasil evaluasi target kinerja 2021 dapat menilai efektifitas pelaksanaan dokumen perencanaan yang telah dibuat. Rincian pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Alokasi anggaran sebesar Rp. 7.368.868.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.755.747.177,00 atau 91,68% dan realisasi fisik 100% yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan capaian terlaksananya kegiatan administrasi persuratan selama 12 bulan.
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan capaian jumlah tagihan yang terbayarkan sebanyak 36 tagihan.
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dengan capaian terlaksanakannya pembayaran perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional sebanyak 24 STNK yang terdiri dari 11 Unit kendaraan roda empat dan 13 Unit kendaraan roda dua.
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan capaian terpenuhinya kegiatan administrasi kesekretariatan berupa pembelian bahan ATK.
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan capaian terpenuhinya kegiatan administrasi kesekretariatan berupa pembayaran bahan fotocopy, penggandaan dan penjiilidan.

- f. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan capaian tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih dan pembayaran upah jasa tenaga kebersihan.
- g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dengan capaian tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar dan majalah.
- h. Penyediaan bahan logistik kantor, dengan capaian tersedianya kebutuhan logistik kantor berupa gula pasir, teh, kopi, air, dll selama 12 bulan.
- i. Penyediaan makanan dan minuman, dengan capaian tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan rapat dan jamuan tamu selama 12 bulan.
- j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah, dengan capaian terlaksananya perjalanan rapat koordinasi ke luar daerah berupa laporan perjalanan dinas.
- k. Penataan/penyediaan bahan arsip/dokumen daerah dengan capaian tersusunnya arsip surat masuk, surat keluar dan SK dalam bentuk *hardcopy*.

2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.217.141.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.004.177.685,00 atau 82,50% yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

- a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang dilaksanakan terhadap 16 OPD sesuai dengan PKPT;
- b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan capaian terlaksanakannya pemeriksaan komprehensif sesuai dengan PKPT.
- c. Pengawasan Desa yang dilaksanakan terhadap 32 Desa;
- d. Reviu Laporan Keuangan yang meliputi :
 - 1) Review Dokumen Perencanaan, dengan capaian terciptanya laporan hasil reviu RKA/RKA Perubahan SKPD, RKPD dan RKPD Perubahan.
 - 2) Review Pengelolaan Anggaran, Pengadaan Belanja dan Dana Desa Serta DAK, dengan capaian terciptanya laporan hasil reviu Pengelolaan Anggaran, Pengadaan Belanja dan Dana Desa Serta DAK.

- 3) Review Laporan Keuangan Daerah, dengan capaian berupa pelaksanaan revidir terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar sebanyak 1 kali dengan 1 Laporan Hasil Revidir.
- e. Revidir Laporan Kinerja dengan capaian terciptanya laporan LAKIP OPD yang dievaluasi, revidir LKJiP dan revidir LPPD;
- f. Kerjasama Pengawasan Internal;
- g. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
- h. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
- i. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Alokasi anggaran sebesar Rp. 248.645.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 175.234.967,00 atau 70,48% yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dengan capaian Peningkatan Kapabilitas APIP level 3;
- b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan dengan capaian Penyusunan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT) dan Fasilitasi Whistle Blowing System dan Konflik Kepentingan;
- c. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dengan capaian Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP), dengan capaian berupa pelaksanaan evaluasi atas dokumen rencana tindak pengendalian (RTP) terhadap 24 SKPD;
- d. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
- e. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan capaian berupa :
 - 1) LHKPN dan LHKASN, dengan capaian berupa terlaksananya verifikasi terhadap pegawai yang melaporkan LHKPN dan LHKASN lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar sebanyak 1 kali;
 - 2) Fasilitasi Korsupgah dan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Serta Pencegahan Korupsi;
 - 3) Pelaksanaan Unit Pengendali Gratifikasi.

- f. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas dengan capaian berupa Fasilitasi dan Persiapan Zona Integritas dan Survey Penilaian Integritas.

Untuk Tahun 2022, pandemi covid sudah mulai berkurang, bahkan peraturan peraturan sudah mulai agak memberi kelonggaran dalam penerapannya. Belajar dari tahun 2022 untuk Rencana Kerja Tahun 2022 mulai disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di tahun 2021. Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 8.357.957.500,00 untuk melaksanakan 3 program dan 36 sub kegiatan. Sampai dengan bulan Juli Tahun 2022 dari alokasi anggaran yang ada sudah terelisasi sebesar Rp.3.242.715.295.603 dengan capain fisik 38,8 %.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu (Tahun 2022) pada Insepektorat Daerah Kabupaten Karanganyar, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Gambaran mengenai pelaksanaan program dan kegiatan Insepktorat Daerah, sejauh mana target kinerja dan capaian tahun yang lalu sampai dengan tahun berjalan serta rencana target kinerja capaian program pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.1 pada sebagai berikut :

Tabel 2.1
EVALUASI RKPD INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2021

NO	Kode Rekening					Program/Kegiatan RKPD Permendagri 13	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Versi Permendagri 90	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
												Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11=10/9	12	13 = (8+10-12)	14 = (13/7)
	6					Uraian Pemerintahan Fungsi Pemangku	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan										
1.	6	01				Pengawasan	Inspektoret Daerah										
A.	6	01	01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penguji Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	78	79,09	76	79,41	104,49	77	335,3	98,72
	6	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Tahun	1	1	1	1	100,00	1	3	100,00
	6	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya rencana strategis, rencana kerja, tujuan dan indikator kinerja yang terukur dan jelas	Dokumen Renstra dan Renja/Renja Perubahan	2	0	0	0	0,00	2	2	100,00
	6	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja RKPD	Terwujudnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen CALK	1	1	1	1	100,00	1	3	100,00
	6	01	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terusunnya laporan kinerja perangkat daerah dan laporan pelaksanaan tugas	LPT LKPD	2	0	0	0	0,00	2	2	100,00
	6	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12	12	12	12	100,00	12	36	100,00
	6	01	01	2	06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga dan alat kebersihan Terpenuhi kebutuhan pencegahan kebakaran	Buah Tabung	1 Paket 450 Buah 3 Tabung	1 Paket 407 Buah 3 Tabung	1 Paket 407 Buah 3 Tabung	1 Paket 407 Buah 3 Tabung	100,00	1 Paket 420 Buah 3 Tabung	1 Paket 1234 Buah 9 Tabung	93,33
	6	01	01	2	06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah logistik kantor Jumlah tabung LPG	Buah/Kg/Dos Tabung	1 Paket 1.750 Buah/Kg/Dos 24 Tabung	1 Paket 1.595 Buah/Kg/Dos 24 Tabung	1 Paket 1.595 Buah/Kg/Dos 24 Tabung	1 Paket 1.595 Buah/Kg/Dos 24 Tabung	100,00	1 Paket 1.600 Buah/Kg/Dos 24 Tabung	1 Paket 4.790 Buah/Kg/Dos 72 Tabung	91,42
	6	01	01	2	06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan Tersedianya jasa penggandaan Tersedianya jasa penjiplakan	Paket	1 Paket 175.000 lembar	1 Paket 125.000 lembar	1 Paket 135.000 lembar	1 Paket 135.000 lembar	100,00	1 Paket 130.000 lembar	1 Paket 410.000 lembar	85,71
	6	01	01	2	06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	Bulan	12	12	12	12	100,00	12	36	100,00
	6	01	01	2	06	07	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	Paket	1	1	1	1	100,00	1	3	100,00
	6	01	01	2	06	08	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Snack dan Makan	Dos	1500 dos snack, 1500 dos makan, 100 snack dan jamuan tamu	1500 dos snack, 1500 dos makan	1100 dos snack, 1100 dos makan, 60 snack dan jamuan tamu	1100 dos snack, 1100 dos makan, 60 snack dan jamuan tamu	100,00	1500 dos snack, 1500 dos makan, 100 snack dan jamuan tamu	4100 dos snack, 4100 dos makan, 160 snack dan jamuan tamu	100,00
	6	01	01	2	06	09	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	Terselenggaranya koordinasi lintas sektoral bidang pengawasan	Bulan	12	12	12	12	100,00	12	36	100,00
	6	01	01	2	06	10	Penataan/penyediaan bahan arsip/dokumen daerah	Terselenggaranya penataan/arsip pada SKPD	Bulan THL	12 1	12 1	12 1	12 1	100,00	12 1	36 3	100,00

6	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12	12	12	12	100,00	12	36	100,00
6	01	01	2.03	01		Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pengiriman surat/dokumen/paket Terselenggaranya pengadaan benda pos Jumlah THL	Benda Pos Bulan Orang	170 Benda Pos 12 Bulan 2 THL	130 Benda Pos 12 Bulan 2 THL	150 Benda Pos 12 Bulan 2 THL	150 Benda Pos 12 Bulan 2 THL	100,00	170 Benda Pos 12 Bulan 2 THL	450 Benda Pos 36 Bulan 6 THL	100,00
6	01	01	2.03	02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa pelayanan listrik, air, telepon, dan internet	Bulan	12	12	12	12	100,00	12	36	100,00
6	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12	12	12	12	100,00	12	36	100,00
6	01	01	2	09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 yang siap pakai Terpeliharanya sepeda motor yang siap pakai	Roda 4 Roda 2	11 13	11 13	11 13	11 13	100,00	11 13	33 39	100,00
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
6	01	01	2	09	06	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor	Paket	1	1	1	1	100,00	1	3	100,00
6	01	01	2	09	09	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung, jaringan listrik dan sanitasi Jumlah THL Jumlah Tenaga Kebersihan	Paket THL Tenaga kebersihan	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	100,00	1 1 1	3 3 3	100,00
6	01	01	2	09	10	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Paket	1	1	1	1	100,00	1	3	100,00
6	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Tahun	1	1	1	1	100,00	1	3	100,00
6	01	01	2	07	05	Pengadaan mebel	Terwujudnya mebel	Paket	0	1	0	0	100,00	1	2	100,00
6	01	01	2	07	07	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket	1	1	1	1	100,00	0	2	100,00
						Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah mobil dinas operasional kantor	Unit	0	1	0	0	100,00	0	1	100,00
						Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terwujudnya perlengkapan gedung kantor	Paket	1	1	0	0	100,00	0	1	100,00
						Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										
6	01	01	2	02		Administrasi Keuangan	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	Bulan	12	12	12	12	100,00	12	36	100,00
6	01	01	2	02	01	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	Tersedianya dokumen yang telah terverifikasi	bulan	12	12	12	12	100,00	12	36	100,00
6	01	01	2	02	03		Tersedianya dokumen yang telah terverifikasi	dokumen	12	12	12	12	100,00	12	36	100,00
6	01	01	2	02	04		Tersusunnya laporan akuntansi sesuai SAP	Dokumen Laporan Keuangan Daerah	12	12	12	12	100,00	12	36	100,00
6	01	01	2	02	05		Terwujudnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Daerah	Dokumen Laporan Keuangan SKPD	1	1	1	1	100,00	1	3	100,00
6	01	01	2	02	07		Terwujudnya 12 Laporan bulanan dan 2 laporan semesteran	Dokumen	14	14	14	14	100,00	14	42	100,00
6	01	01	2	02	02		Terwujudnya pejabat fungsional tertentu yang dinilai	PAK	80	52	48	48	100,00	72	172	90,00

6	01	02	2.01	01	07	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan											
						Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif											
						Pelaksanaan LARWABDA	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APP	Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Obrik atas Temuan oleh BPK/BKRP/Inspektori Pro Jumlah THI	42	42	42	42	100,00	42	126	
						Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa				3	3	3	3		3	9	
						Inventarisasi temuan pengawasan											
						Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan RDH		Jumlah kebijakan RDH	Kajian	-	18	18	18	100,00	18	40	
6	01	02	2	02			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	100	100	100,00	100	300	
6	01	02	2	02	01		Penanganan Penyediaan Kerugian Negara/ Daerah	Penyusunan Laporan Jumlah kerugian negara	Kasus	20	0	18	18	100,00	18	30	
6	01	02	2	02	02		Pelaksanaan Pemantauan Khusus	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	LHP	10	40	10	10	100,00	10	60	
C	6	01	03				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1. Presentase tingkat kepatuhan pelaporaan kebijakan Pejabat Negara dan ASN 2. Presentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level tertinggi 3. Presentase kepatuhan kegiatan pengawasan dengan PKPT	%	100	100	100	100	100,00	100	300	
									%	100	76	76	76		80	232	
									%	100	100	100	100		100	300	
6	01	03	2	01			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Terciptanya kebijakan pendampingan dan asistensi yang baik	%	100	100	100	100	100,00	100	300	
6	01	03	2	01	01		Peningkatan Kapabilitas APH	Peningkatan level kapabilitas APH	Level	3	3	3	3	100,00	3	106	
6	01	03	2	01	01		Fasilitas Whistle Blowing System dan Komik Kepentingan										
						Program Pemetaan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Terwujudnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	PKPT	1	1	1	1	100,00	1	3	
						Penyusunan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT)											
						Penyusunan Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Daerah (e-Wasda)											
6	01	03	2	02			Pendampingan dan Asistensi	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	%	100	100	100	100	100,00	100	300	
6	01	03	2	02	01		Pendampingan dan Asistensi Urusan Daerah	Terwujudnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	OPD	OPD Seluruh Kab Kra	OPD Seluruh Kab Kra	OPD Seluruh Kab Kra	OPD Seluruh Kab Kra	100,00	OPD Seluruh Kab Kra	OPD Seluruh Kab Kra	
6	01	03	2	02	02		Sistem Pelaporan Reformasi Birokrasi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	OPD	12	12	16	13	100,00	16	42	
6	01	03	2	02	03		Pelaksanaan Unit Pengendali Gratifikasi										
						LHKPH dan LHKARN	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pengawasan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan Jumlah THI	Laporan	7	7	7	7	100,00	7	21	
6	01	03	2	02	04		Survey Penilaian Integritas	Terwujudnya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kegiatan	1	1	1	1	100,00	1	3	
						Fasilitas dan Penerimaan Zona Integritas											

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengawasan.

Di dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 107 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan kelurahan. Selain itu, disebutkan bahwa struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar terdiri dari terdapat 7 jabatan struktural terdiri dari 1 (satu) jabatan eselon II.b, 5 (lima) jabatan eselon III.a, dan 3 (tiga) jabatan eselon IV.a.

Sesuai dengan tupoksinya, pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar didominasi oleh penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengawasan. Pelaksanaan tupoksi ini tentu harus dapat diukur kinerjanya. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Capaian kinerja pelayanan untuk tahun 2020 diukur dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, dan dalam koridor Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Merujuk pada norma dan standar pelayanan pada BPKP dan APIP lainnya. Analisis pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Renstra				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2022	2023	
1.	Maturitas SPIP	Nilai	3	3	3	3	3	2,634	Na	Na	3	3	
2.	Level Kapabilitas APIP	Level	Na	3	3	3	3	3	Na	Na	3	3	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam menentukan proses pengawasan untuk mengawal pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaannya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pengawasan dalam menganalisa risiko serta secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Inspketorat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam pengawasan karena dampaknya signifikan bagi organisasi dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Inspektorat Daerah sebagai salah satu pilar manajemen pemerintahan yang bertanggungjawab melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan, wajib melakukan antisipasi dan menyiapkan strategi untuk mengantisipasi tuntutan perubahan lingkungan strategis tersebut dalam rangka mengambil peran dan memberikan kontribusi yang maksimal bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah juga harus dapat berperan sebagai pemberi konsultan dan quality assurance, yang dapat memberikan jaminan bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturan dalam mencapai tujuan organisasi. Inspektorat

Daerah tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi *stakeholder*.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar yang mendukung Misi kelima dari Kepala Daerah yaitu Peningkatan kualitas keagamaan, Sosial budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah raga, diharapkan dengan teratasinya permasalahan yang ada bisa menghasilkan hasil yang maksimal sehingga bisa mendukung RPJMN khususnya meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas serta mendukung tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang terkait dengan penguatan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, penyediaan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.

Identifikasi isu - isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

1. Tuntutan Pelayanan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel dan bersih dari KKN;
2. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di OPD Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
3. Tuntutan peningkatan terhadap Kapabilitas APIP;
4. Tuntutan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Secara umum terdapat 3 (tiga) peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar, yaitu :

1. Adanya mandat penguatan peran Inspektorat Daerah.
Mandat adalah pendelegasian kewenangan yang diterima oleh organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Penguatan peran Inspektorat Daerah ini tidak terlepas dari mandat yang diterima dengan terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan.
2. Komitmen Pemerintah Daerah terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang baik.
Perkembangan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan

dari tata kelola pemerintahan yang tidak transparan, tidak partisipatif, dan tidak demokratis menjadi tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif menjadi tuntutan publik yang harus disikapi oleh pemerintah. Perubahan penyelenggaraan pemerintahan tersebut diharapkan dapat memuaskan semua komponen masyarakat dalam pelayanan publik maupun kinerja pemerintah.

Upaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah sebagai bagian dari *Good Governance* perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah, melalui (1) menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan; (2) meraih opini WTP; (3) senantiasa melakukan antisipasi terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah, dan (4) perlunya penguatan peran Inspektorat.

3. Sumber Daya Manusia yang berintegritas.

Inspektorat Daerah telah memiliki aparat yang telah menjunjung tinggi kode etik, menghindari/menolak gratifikasi dan timbulnya konflik kepentingan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Dimana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar dilakukan proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan karena beberapa alasan diantaranya:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPD dengan kebutuhan pada satuan kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar.
2. Untuk memperoleh gambaran penyebab adanya perbedaan tersebut sesuai rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan
3. Untuk mengetahui ada atau tidaknya kegiatan baru yang tidak terdapat dirancangan awal RKPD atau program dan kegiatan yang cocok namun besarannya berbeda.

Dibandingkan dengan rancangan awal RKPD 2022, maka RENJA tahun 2023 tidak ada perbedaan dalam susunan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan Renja menjadi penting mengingat RKPD selanjutnya menjadi patokan dalam penyusunan KUA PPAS dan

RAPBD Kabupaten Karanganyar. Dengan demikian amat penting untuk menyusun RENJA SKPD dengan patokan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD tahun yang sama demi kemudahan administrasi, sinkronisasi dan keselarasan antar Renja SKPD dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKP TAHUN 2023
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Inspektorat Daerah				10.382.253.000	Inspektorat Daerah				10.382.253.000	
	A.1. Belanja Operasi				10.387.253.000	A.1. Belanja Operasi				10.387.253.000	
	Belanja Pegawai				6.204.253.000	Belanja Pegawai				6.204.253.000	
	Belanja Barang Jasa				4.183.000.000	Belanja Barang Jasa				4.183.000.000	
	A.2. Belanja Modal				25.000.000	A.2. Belanja Modal				25.000.000	
	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan					Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan					
	Inspektorat Daerah Daerah				10.382.253.000	Inspektorat Daerah Daerah				10.382.253.000	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah	Capaian Nilai BAKIP	78	7.507.253.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah	Capaian Nilai BAKIP	78	7.507.253.000	
a	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Terwujudnya Tertib Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	20.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Terwujudnya Tertib Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	20.000.000	
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen (Renja dan Perubahan Renja) Renstra	4.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen (Renja dan Perubahan Renja) Renstra	4.000.000	
2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen (LPT dan LKPD)	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen (LPT dan LKPD)	4.000.000	
3)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	12.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	12.000.000	
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	100%	6.240.253.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	100%	6.240.253.000	
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Daerah	Tersedianya dokumen gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	6.204.253.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Daerah	Tersedianya dokumen gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	6.204.253.000	
2)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Inspektorat Daerah	Terwujudnya pejabat fungsional tertentu yang dinilai	70 PAK	20.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Inspektorat Daerah	Terwujudnya pejabat fungsional tertentu yang dinilai	70 PAK	20.000.000	
3)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Inspektorat Daerah	Tersedianya dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	4.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Inspektorat Daerah	Tersedianya dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	4.000.000	
4)	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
5)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	3.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	3.500.000	
6)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	14 Laporan	3.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	14 Laporan	3.500.000	

c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Terwujudnya peningkatan kebijakan ASN	100%	225.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Terwujudnya peningkatan kebijakan ASN	100%	225.000.000	
1)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Inspektorat Daerah	Terwujudnya ATP yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan latihan pengembangan profesi	12 Bulan	225.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Inspektorat Daerah	Terwujudnya ATP yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan latihan pengembangan profesi	12 Bulan	225.000.000	
d	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	417.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	417.000.000	
1)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Inspektorat Daerah	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan Terpenuhiya kebutuhan perlengkapan pemecahan kebakaran	1 Paket 3 Tabung	25.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Inspektorat Daerah	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan Terpenuhiya kebutuhan perlengkapan pemecahan kebakaran	1 Paket 3 Tabung	25.000.000	
2)	Penyediaan bahan logistik kantor	Inspektorat Daerah	Jumlah paket logistik yang disediakan Jumlah tabung LPG yang disediakan	1 Paket 24 Tabung	25.000.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Inspektorat Daerah	Jumlah paket logistik yang disediakan Jumlah tabung LPG yang disediakan	1 Paket 24 Tabung	25.000.000	
3)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Inspektorat Daerah	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	60.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Inspektorat Daerah	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	60.000.000	
4)	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat Daerah	Tersedianya Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	2.000.000	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat Daerah	Tersedianya Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	2.000.000	
5)	Penyediaan Bahan/Material	Inspektorat Daerah	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	1 paket	85.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Inspektorat Daerah	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	1 paket	85.000.000	
6)	Facilitasi Kunjungan Tamu	Inspektorat Daerah	Jumlah Makan dan Minum Kasel Jumlah Makan Pemesorangan Jumlah Jamuan Tamu	1500 dos 1500 dos 100 pax	85.000.000	Facilitasi Kunjungan Tamu	Inspektorat Daerah	Jumlah Makan dan Minum Kasel Jumlah Makan Pemesorangan Jumlah Jamuan Tamu	1500 dos 1500 dos 100 pax	85.000.000	
7)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat Daerah	Terseleenggaranya koordinasi lintas sektoral bidang pengawasan	12 bulan	85.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat Daerah	Terseleenggaranya koordinasi lintas sektoral bidang pengawasan	12 bulan	85.000.000	
8)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Inspektorat Daerah	Terseleenggaranya penatausahaan arsip Jumlah THL	12 bulan 1 Orang	50.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Inspektorat Daerah	Terseleenggaranya penatausahaan arsip Jumlah THL	12 bulan 1 Orang	50.000.000	
e	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	28.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	28.000.000	
1)	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Inspektorat Daerah	Jumlah paket Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	1 Paket	28.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Inspektorat Daerah	Jumlah paket Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	1 Paket	28.000.000	
f	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	260.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	260.000.000	
6	Penyediaan jasa surat menyurat	Inspektorat Daerah	Jumlah paket benda pos yang disediakan Terlaksananya pengiriman surat/dokumen/paket Jumlah THL	1 Paket 12 Bulan 1 Orang	50.000.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Inspektorat Daerah	Jumlah paket benda pos yang disediakan Terlaksananya pengiriman surat/dokumen/paket Jumlah THL	1 Paket 12 Bulan 1 Orang	50.000.000	
6	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Inspektorat Daerah	Tersedianya jasa pelayanan listrik, air, telepon, dan internet	12 bulan	210.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Inspektorat Daerah	Tersedianya jasa pelayanan listrik, air, telepon, dan internet	12 bulan	210.000.000	

g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektoriat Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	320.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektoriat Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	320.000.000
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspektoriat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24 Unit	200.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspektoriat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24 Unit	200.000.000
2)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektoriat Daerah	Jumlah paket peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 paket	40.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektoriat Daerah	Jumlah paket peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 paket	40.000.000
3)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektoriat Daerah	Jumlah paket Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara Jumlah THL	1 paket 2 Orang	38.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektoriat Daerah	Jumlah paket Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara Jumlah THL	1 paket 2 Orang	38.000.000
4)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektoriat Daerah	Jumlah paket Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	1 paket	26.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektoriat Daerah	Jumlah paket Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	1 paket	26.000.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kabupaten Karanganyar	1. Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan yang berakibat pada kerugian negara atau daerah; 2. Persentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan; 3. Persentase tindak lanjut dengan rekomendasi; 4. Persentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti; 5. Persentase LHR LKPD dan OPD	98% 10% 95% 100% 1	2.100.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kabupaten Karanganyar	1. Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan yang berakibat pada kerugian negara atau daerah; 2. Persentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan; 3. Persentase tindak lanjut dengan rekomendasi; 4. Persentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti; 5. Persentase LHR LKPD dan OPD	98% 10% 95% 100% 1	2.100.000.000
a	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kabupaten Karanganyar	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obyek dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	1.900.000.000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kabupaten Karanganyar	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obyek dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	1.900.000.000
1)	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	16 LHP	200.000.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	16 LHP	200.000.000
2)	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Laporan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	36 LHP	380.000.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Laporan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	36 LHP	380.000.000
3)	Revisi Laporan Kinerja	Inspektoriat Daerah	Jumlah LAKIP OPD yang dievaluasi Jumlah revisi LKJP Jumlah revisi LPPD	41 LHE 1 LHR 1 LHR	100.000.000	Revisi Laporan Kinerja	Inspektoriat Daerah	Jumlah LAKIP OPD yang dievaluasi Jumlah revisi LKJP Jumlah revisi LPPD	41 LHE 1 LHR 1 LHR	100.000.000
4)	Revisi Laporan Keuangan	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Hasil Revisi DAK Jumlah Hasil Revisi LKPD dan LK OPD Jumlah Hasil Revisi RKA/RKAP Jumlah Hasil Revisi RKPD/RKPD Perubahan	24 LHP 11 LHP 41 LHP 41 LHP	250.000.000	Revisi Laporan Keuangan	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Hasil Revisi DAK Jumlah Hasil Revisi LKPD dan LK OPD Jumlah Hasil Revisi RKA/RKAP Jumlah Hasil Revisi RKPD/RKPD Perubahan	24 LHP 11 LHP 41 LHP 41 LHP	250.000.000
5)	Pengawasan Desa	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	32 LHP	250.000.000	Pengawasan Desa	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	32 LHP	250.000.000
6)	Kerjasama Pengawasan Internal	Kabupaten Karanganyar	Jumlah laporan pencegahan dan pemberantasan gratifikasi dan pungutan liar Terselenggaranya rapat koordinasi	12 Laporan 12 Bulan	250.000.000	Kerjasama Pengawasan Internal	Kabupaten Karanganyar	Jumlah laporan pencegahan dan pemberantasan gratifikasi dan pungutan liar Terselenggaranya rapat koordinasi	12 Laporan 12 Bulan	250.000.000
7)	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Objek Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP Jumlah THL Larwanda	41 Objek 4 Orang	500.000.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Objek Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP Jumlah THL Larwanda	41 Objek 4 Orang	500.000.000
b	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kabupaten Karanganyar	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obyek dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	200.000.000	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kabupaten Karanganyar	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obyek dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	200.000.000
1)	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Audit Investigasi Jumlah Kerugian Negara/Daerah	20 Kasus	100.000.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Audit Investigasi Jumlah Kerugian Negara/Daerah	20 Kasus	100.000.000
2)	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Audit Dengan Tujuan Tertentu	10 Kegiatan	100.000.000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Audit Dengan Tujuan Tertentu	10 Kegiatan	100.000.000

3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Kab Karanganyar	1. Presentase tingkat kesadaran pelaporan kekayaan pejabat negara dan ASN 2. Presentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi 3. Presentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT	100% 100% 100%	775.000.000	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Kab Karanganyar	1. Presentase tingkat kesadaran pelaporan kekayaan pejabat negara dan ASN 2. Presentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi 3. Presentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT	100% 100% 100%	775.000.000	
a	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Inspektorat Daerah	Terciptanya kebijakan pendampingan dan asistensi yang baik	100%	170.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Inspektorat Daerah	Terciptanya kebijakan pendampingan dan asistensi yang baik	100%	170.000.000	
1)	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Inspektorat Daerah	Peningkatan level kapabilitas APIP	Level 3	70.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Inspektorat Daerah	Peningkatan level kapabilitas APIP	Level 3	70.000.000	
2)	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Inspektorat Daerah	Terwujudnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	PKPT	100.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Inspektorat Daerah	Terwujudnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	PKPT	100.000.000	
b	Pendampingan dan Asistensi	Kabupaten Karanganyar	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	100%	605.000.000	Pendampingan dan Asistensi	Kabupaten Karanganyar	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	100%	605.000.000	
1)	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	41 Perangkat Daerah	150.000.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	41 Perangkat Daerah	150.000.000	
2)	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 Perangkat Daerah	55.000.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 Perangkat Daerah	55.000.000	
3)	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan dan pemenuhan indikator pencegahan korupsi	7 Laporan 3 THL	300.000.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan dan pemenuhan indikator pencegahan korupsi	7 Laporan 3 THL	300.000.000	
4)	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kabupaten Karanganyar	Terwujudnya Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 Kegiatan	100.000.000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kabupaten Karanganyar	Terwujudnya Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 Kegiatan	100.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar mempunyai tugas pokok membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan yang menjadi kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar hanya membuat program dan kegiatan lingkup pembinaan dan pengawasan regular melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) serta pengembangan aparatur pengawasan sehingga usulan program dan kegiatan dari masyarakat secara langsung tidak ada. Akan tetapi, masyarakat dapat mengajukan laporan melalui pengaduan masyarakat atas indikasi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku untuk diadakan pemeriksaan tujuan tertentu/khusus/kasus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023
Kabupaten Karanganyar
Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			